PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

RENCANA KERJA (RENJA)



TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NUNUKAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas BerkatNya dan RahmatNya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 masih tetap memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dalam peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta memuat kebijakan pemerintah secara menyeluruh termasuk instrument anggaran.

Dengan demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 oleh masing-masing bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan..

Nunukan, 31 Juli 2025

KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S. Sos., M. Si
NIP. 10700810 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistimatika Penulisan 6

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 42
3.3 Program dan Kegiatan 44

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 48

BAB V
PENUTUP 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD, hal ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunuka tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Perturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Perturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
12. Permenpan dan RB. Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Repbublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi

pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan menyusun dan merumuskan Rencana Kerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan,

lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan rencana kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi program dan kegiatan tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BABA IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana kerja dan pendanaan Program, dan Kegiatan SKPD

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana Tindak lanjut dan harapan dari Kepala SKPD.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja selain merupakan wujud pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran, tujuan, organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis lewat pelaksanaan program dan kegiatan.

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Terbatasnya pelayanan kepada masyarakat terutama pada wilayah 3, 4, dan 5 Hal ini disebabkan kurangnya personil bahan pada 4 Kecamatan Tidak Tersedia personil Satpol. PP yaitu pada Kecamatan Sei Manggaris, Kecamatan Sembakung Atualy, Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.
2. Pelaksanaan koordinasi bersama OPD selaku Pemangku Perda, Instansi vertikal, TNI/Polri masih kurang.
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sector secara internal yang berpotensi terhadap kewenangan, Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawab.

4. Terbatasnya anggaran pada kegiatan prioritas seperti kegiatan operasional Patroli Wilayah, ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Perda dan Perkada sehingga jangkauan terhadap pelaksanaan kegiatan juga terbatas. Saat ini penanganan kasus masih dominan pada wilayah Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan serta dan di beberapa Kecamatan di wilayah pulau Sebatik.

Implikasi terhadap capaian program renstra perangkat daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- Melihat skala prioritas dari Program/Kegiatan dalam Melakukan rasionalisasi, agar tidak berdampak pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- Mengusulkan kembali Program/Kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk pencapaian target yang belum terpenuhi.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian secara langsung terhadap target Program.

dari uraian tersebut diatas dapat disajikan kedalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sebagai berikut :

TABEL. C.29
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Resntra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2024 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2025(Tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**500**	**200**	**100**	**87,3**	**87,3**	**100**	**387**	**77,46**

1.05.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**50**	**30**	**10**	**10**	**100**	**10**	**50**	**100,00**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	3	1	1	100	1	5	100,00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45	27	9	9	100	9	45	100,00
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**70**	**42**	**14**	**14**	**100**	**14**	**70**	**100,00**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	75	79	75	94,94	79	75	94,94
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	262	150	75	50,00	150	487	81,17
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28	7	7	7	100,00	7	21	75,00

1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12	3	3	3	100,00	3	9	75,00
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian**	**25**	**12**	**5**	**5**	**100**	**5**	**22**	**88,00**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	3	1	1	100	1	5	100,00
;1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	16	2	2	100	2	20	111,11
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	55	20	20	100	20	95	95,00
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**25**	**12**	**5**	**5**	**100**	**5**	**22**	**88,00**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80,00

1.05.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	7	4	4	100	4	15	78,95
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	14	7	7	100	7	28	80,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137	47	28	26	92,86	30	103	75,18
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**6**	**0**	**1**	**5**	**0**	**2**	**7**	**116,67**
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	0	1	5	0	2	7	116,67
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**120**	**48**	**24**	**24**	**100**	**24**	**96**	**80,00**
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80,00

1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80,00
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**17**	**16**	**16**	**16**	**100**	**16**	**16**	**94,12**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	9	100	9	27	300,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	5	5	100	5	15	300,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	2	2	0	2	6	200,00
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**500**	**266**	**100**	**101**	**101**	**100**	**467**	**93,48**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**2515**	**1335**	**503**	**510**	**101**	**503**	**2348**	**93,36**

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2500	1328	500	508	102	500	2336	93,44
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	15	7	3	2	67	3	12	80,00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10	4	2	2	100	2	8	80,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1200	480	240	130	54	240	850	70,83

1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5117	1624	30	80	267	25	1729	33,79
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	70	22	14	14	100	16	52	74,29
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20	8	4	4	100	4	16	80,00
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**40**	**16**	**8**	**8**	**100**	**8**	**32**	**80,00**
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	19	5	5	5	100	5	15	78,95
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	240	88	50	50	100	60	198	82,50

1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	250	100	50	50	100	50	200	80,00
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**10**	**2**	**2**	**2**	**100**	**2**	**6**	**60,00**
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	10	2	2	2	100	2	6	60,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menetapkan dua indikator. Adapun indikator tersebut dapat disajikan kedalam tabel seperti dibawah ini :

TABEL C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Relasiasi 2024 dan Proyeksi 2025 menggunakan persentase target realisasi program
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten.	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Relasiasi 2024 dan Proyeksi 2025 menggunakan persentase target realisasi Kegiatan

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI
1	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) yang ditangani/Jumlah laporan atau teridentifikasi X 100%	Data bersumber dari Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni data laporan dari masyarakat atau hasil Identifikasi pelanggaran K3 oleh Satpol PP melalui kegiatan Patroli, Pendataan dan Pengawasan	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja sasaran per triwulan
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada / Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkada x 100%	Data bersumber dari Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah yakni data hasil penegakan peraturan daerah yang memiliki dampak kepada warga Negara sesuai Peraturan yang berlaku.	Berpedoman pada data sesuai peratuan, Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke bidang Penegakan, melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja sasaran per triwulan

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan adapun isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut :

- Peningkatan Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada.
- Optimalisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.
- Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait Perda/Perkada.
- Peningkatan Koordinasi dan konsultasi lintas bidang dan bagian pada internal Satpol PP.
- Penigkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.
- Dukungan sarana dan prasana.

Permasalahan dan hambatan yang dialami selama pada 2024 dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Dalam upaya merealisasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2021 – 2026, banyak menemui Berbagai Permasalahan dan Hambatan baik dari dalam (Intern) maupun dari luar (Eksteren). Untuk itu dituntut peran serta dan kerjasama yang sinergi dari seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja,

lintas instansi, Aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya Sinergitas antar lembaga/instasi, Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum lainnya;
b. Koordinasi dan komunikasi lintas bidang serta bagian secara internal belum berjalan dengan baik;
c. Jumlah personil masih belum memadai dibanding dengan tugas, fungsi dan letak geografis wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan Negara lain.
d. Kurangnya aparatur yang menguasai permasalahan dengan spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni.
e. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang masih kurang lengkap.
f. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Perda maupun Perkada.

Dengan permasalahan dan hambatan tersebut diatas akan sangat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang telah dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terhadap capaian program Nasional terutama pada Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah menghadapi berbagai macam tantangan, diantaranya :

1. Rendahnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah antara lain ditandai dengan :
   a. Maraknya pembangunan rumah/toko/gedung baru yang tidak memiliki dan/atau tidak sesuai dengan IMB serta melewati GSB.
   b. Maraknya tempat usaha yang berdiri tanpa dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan mengatur tentang Penyelenggaraan hiburan umum, pengelolaan kebersihan dan Perijinan.
2. Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktifitas diatas trotoar, badan jalan, pertokoan dan fasilitas umum lainnya.
3. Sinergitas kepada OPD pengampuh Perda masih kurang.
4. Masih kurangnya kemampuan dan kapasitas personil.
5. Terbatasnya personil dan sarana prasarana pendukung kegiatan operasional.

Dengan adanya tantangan tersebut, maka peluang Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Melakukan kegiatan Sosialisasi, Penertiban, Pengawasan, Penanganan dan Evaluasi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang taat dan patuh pada Perda dan Perkada;
2. Melaksanakan operasi patroli pengawasan secara intensif dalam upaya menekan maraknya PKL yang beraktfitas diatas

trotoar, badan jalan/bahu jalan, pertokoan dan fasilitas umum lainnya;

3. Terjalinnya koordinasi antara PD teknis sebagai pemangku Perda dan *Stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda;
4. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peningkatan jumlah kuantitas personil dan pemenuhana sarana prasarana pendukung kegiatan operasional.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026, Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2026. Secara spesifik review rancangan awal RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan, hal ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat disampaikan kedalam Tabel dibawah ini.

Tabel C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Nunukan

NO.	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026					CATATAN OPD
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.636.562.164,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.462.619.540,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	12.315.542.633,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	15.562.942.749,00	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	Kabupaten Nunukan	**34 Dokumen**	**212.657.510**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tersedia**	Kabupaten Nunukan	**34 Dokumen**	**212.657.510**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	49.530.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	49.530.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	12 Dokumen	127.627.010	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	12 Dokumen	127.627.010	Adanya kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam bentuk Rakor dan Bimtek
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		15 Dokumen	35.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Nunukan	15 Dokumen	35.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kabupaten Nunukan**	**14 Bulan**	**8.219.746.874**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kabupaten Nunukan**	**12 Bulan**	**10.800.240.542**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	87 Orang/Bulan	8.139.499.934	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	87 Orang/Bulan	10.719.993.602	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Nunukan	150 Dokumen	37.018.940	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kabupaten Nunukan	150 Dokumen	37.018.940	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	-						Dihilangkan karena kurang relevan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	3 Laporan	Rp 43.228.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	4 Laporan	Rp 43.228.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD**	**Kabupaten Nunukan**	**9 Dokumen**	**Rp 57.250.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD**	**Kabupaten Nunukan**	**9 Dokumen**	**Rp 57.250.000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	Rp 18.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	Rp 18.500.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	Rp 38.750.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	Rp 38.750.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian**	**Kabupaten Nunukan**	**5 Unit**	**246.151.912**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**	**Kabupaten Nunukan**	**1 Dokumen**	**246.151.912**	***Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan***
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	202.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	202.500.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Nunukan	12 Dokumen	13.287.912	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Nunukan	12 Dokumen	13.287.912	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Nunukan	2 Orang	Rp 30.364.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Nunukan	2 Orang	Rp 30.364.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Nunukan	20 Orang	Rp -						Dihilangkan karena merupakan Tupoksi Bagian Hukum
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**		**5 Unit**	**244.635.477**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**		**4 Dokumen**	**244.635.477**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	6.290.680	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	6.290.680	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	35.285.670	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	35.285.670	Pemenuhan fasilitas sarana perkantoran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	53.059.127	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	7 Paket	53.059.127	Adanya tambahan pagu penyediaan barang cetak dan pengganda an

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	3 Paket	-					-	Dialihkan pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor (penyesuaian nomenklatur)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	30 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	30 Laporan	150.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Kabupaten Nunukan**	**2 Unit**	**Rp 101.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Kabupaten Nunukan**	**2 Unit**	**Rp 99.900.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	2 Unit	99.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	2 Unit	99.900.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1 Unit	1.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	0 Unit	-	Akan direncanakan kembali di Tahun 2027
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1 Unit	1.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	0 Unit	-	Akan direncanakan kembali di Tahun 2027

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 Laporan**	**3.067.016.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Nunukan**	**2 Dokumen**	**3.684.522.448**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 104.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 104.900.000	Adanya kenaikan penggunaan beban listrik dan mengantisipasi terjadinya musim kemarau untuk pembelian air tangki
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 2.962.116.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 3.579.622.448	Adanya kenaikan gaji Non ASN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**		**22 Unit**	**Rp 167.084.860**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**Kabupaten Nunukan**	**22 Unit**	**Rp 217.584.860**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Nunukan	16 Unit	158.134.860	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Nunukan	16 Unit	158.134.860	Adanya penambahan kendaraan sebanyak 5 unit

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Nunukan	5 Unit	Rp 8.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Nunukan	5 Unit	Rp 8.950.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Nunukan	1 Unit	Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Nunukan	1 Unit	Rp 50.500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**		**100%**	**2.321.019.531,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan** **2. Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan**	**Kabupaten Nunukan**	**100%** **100%**	**3.899.676.791,00**	**Program Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pendukung Outcome LPPD**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**Kabupaten Nunukan**	**500 Kasus**	**1.810.761.613**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani** **2. Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan**	**Kabupaten Nunukan**	**504 Kasus** **30 Orang**	**2.983.176.791**	***Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan) dan pendukung LPPD***
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	288.653.500	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	375.316.257	

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Nunukan	240 Dokumen	126.080.250	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Nunukan	240 Dokumen	159.457.201	Menindaklanjuti Instruksi Kemendagri No. 300.1.4/4980/BAK Terkait pengalokasian Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satgas linmas dan Anggota Satlinmas
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Nunukan	25 Orang	-						Sub kegiatan dalam SIPD tidak ada
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kabupaten Nunukan	16 Dokumen	77.039.750	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kabupaten Nunukan	16 Dokumen	113.629.122	Target capain naik, kerjasama antar lembaga lebih intens dalam rangka pencegaha

											n dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
					-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		7 Dokumen	3.920.000	*Pendukung SPM dan LPPD*
					-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Luar Daerah	5 Orang	100.000.000	*Pegawai Satpol PP PNS diwajibkan melaksanakan Diklat Dasar Berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2020*
					-	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Luar Daerah	15 Orang	100.000.000	*Persyaratan untuk perpindahan jenjang*

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kabupaten Nunukan	60 Orang	185.087.160	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kabupaten Nunukan	60 Orang	185.254.613	*Sub Kegiatan Pendukung LPPD*
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kabupaten Nunukan	500 Kasus	1.040.172.180	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	1.821.870.825	*Sub Kegiatan Pendukung LPPD*
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Nunukan	3 Kasus	48.595.273	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Nunukan	4 Laporan	48.595.273	Indikasi terjadinya demonstrasi, Berdasarkan identifikasi pelaksanaan demonstrasi unjuk rasa sebanyak 4 kali

	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kabupaten Nunukan	4 Laproran	45.133.500	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kabupaten Nunukan	4 Laprorarn	45.133.500	*Sub Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan penerima layanan)*
					-	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Kabupaten Nunukan	1 Dokumen	30.000.000	*Sub Kegiatan Pendukung LPPD*
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**		**8 Perda/Perkada**	**378.154.898**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**Kabupaten Nunukan**	**23 Perda/Perkada**	**701.500.000**	***Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan) dan pendukung LPPD***
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	60.000.000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	150.000.000	

					-	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2 Dokumen	1.500.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kabupaten Nunukan	5 Laporan	-					-	Sosialisasi Perda/perkada yang memuat sanksi secara langsung merupakan kewenangan OPD Teknis, namun kegiatan sosialisasi ini tetap dilaksanakan sekaligus dalam saat pembinaan dan penyuluhan
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kabupaten Nunukan	50 Laporan	208.268.538	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	300.000.000	Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran perde/perkada yang berdampak terhadap peningkatan PAD

											(pembayaran pajak}
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabupaten Nunukan	60 Laporan	109.886.360	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	250.000.000	Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran perde/perkada yang berdampak terhadap peningkatan PAD (pembayaran pajak}
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**		**2 Orang**	**132.103.020**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	Kabupaten Bogor	**6 Orang**	**215.000.000**	***Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan) dan pendukung LPPD***
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Luar Daerah	1 Orang	35.000.000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Luar Daerah	1 Orang	40.000.000	

	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Kabupaten Bogor	4 Laporan	34.400.000	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Kabupaten Bogor	4 Laporan	50.000.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Bogor	2 Orang	62.703.020	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kabupaten Bogor	4 Laporan	125.000.000	

2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Pada pelaksanaan forum Musrenbang tingkat kecamatan se Kabupaten Nunukan, tidak terdapat usulan/masukkan maupun rekomendasi untuk menjadi Program/Kegiatan Satuan polisi Pamong Praja.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Nunukan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI			VOLUME	CATATAN PENTING
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**100,00%**	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**503 Kasus**	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	

		Sebatik Tengah	Aji Kuning	Untuk meningkatkan kualitas SDM Linmas perlu dilakukan Pelatihan Linmas Desa beserta bantuan seragam Linmas dengan Atributnya dan perlu juga senantiasa dilaksanakan Sosialisasi tentang gangguan Kamtibmas	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Sebatik Tengah	Bukit Harapan	Perlu adanya peningkatan kapasitas atau pelatihan Satlinmas	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Sebatik Tengah	Sungai Limau	Perlu adanya peningkatan kapasitas Satlinmas agar Linmas lebih menguasai terkait Tugas dan Fungsinya	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut : "*Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah".*

Berdasarkan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sasaran Program

Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan indikator kegiatan Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Nunukan hanya saja masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala yang dihadapi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran atau implementasi dari RPJMD Kabupaten Nunukan. Adapun Tujuan Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah :

"Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat"

Sedangkan Sasaran dari Renaca Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan secara proporsional melalui program kegiatan yang bersifat spesifik, terinci serta dapat diukur serta dicapai. Berdasarkan maksud penetapan sasaran dalam kurun waktu satu tahun yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat; dan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

Adapun tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel III dibawah ini :

Tabel III. 1

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP TAHUN 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumusan Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026
1	2	3	4	5	6	10
1.	Meningkatnya Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah di Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang dilaporkan dikali 100%	%	100
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Sanksi dikali 100%	%	100
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Desa dan kelurahan yang telah membentuk Satlinmas (Aktif) dibagi Jumlah keseluruhan Desa dan kelurahan dikali 100%	%	37,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi AKIP yang diperoleh	Predikat	BB

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan implementasi tugas yang dilaksanakan secara nyata dan terpadu yang merupakan Kebijakan sebagai arah dan juga dijadikan sebagai Pedoman, pegangan, petunjuk aparatur Pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan tugas dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang dapat memberikan konstribusi dalam pencapaian **Visi dan Misi** Kabupaten Nunukan.

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satpol PP dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan sesuai dengan Misi 6 Bupati Nunukan yaitu "*Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram*". Adapun untuk mendukung misi bupati tersebut diatas berikut kami sampaikan bahan pertimbangan rumusan Program dan Kegiatan seperti dibawah ini :

I. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2026 :
   - Jumlah Program : 2
   - Jumlah Kegiatan : 11
   - Jumlah Sub Kegiatan : 39
   - Pagu Indikatif APBD : Rp 18.980.222.260,-

II. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Tahun 2026 adalah :
   1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
      a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
         - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan dasar Pol PP dan Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional;
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan fungsional Pol PP Promosi dan kenaikan jenjang jabatan;
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;
- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada; dan
- Pembentukan Satgas Linmas tingkat Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sub Kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan
- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;
- Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS; dan
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

III. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi Pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Tahun 2026 adalah :

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- Evaluasi kinerja perangkat daerah.

e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

f. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; dan
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
   - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.

h. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

i. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

j. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

k. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sedangkan Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja Negara sesuai dengan ketentuan berlaku.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 disajikan pada Tabel IV.1 seperti dibawah ini :

TABEL C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**19.247.465.197,00**				**19.247.465.197,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**		**100%**	**15.562.942.749,00**			**100%**	**15.562.942.749,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tersedia**	Kabupaten Nunukan	**34 Dokumen**	**212.657.510**			**34 Dokumen**	**212.657.510**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	49.530.500	APBD II		7 Dokumen	49.530.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	12 Dokumen	127.627.010	APBD II	Adanya kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam bentuk Rakor dan Bimtek	12 Dokumen	127.627.010
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Nunukan	15 Dokumen	35.500.000			15 Dokumen	35.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kabupaten Nunukan**	**12 Bulan**	**10.800.240.542**	APBD II		**12 Bulan**	**10.800.240.542**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	87 Orang/Bulan	10.719.993.602	APBD II		87 Orang/Bulan	10.719.993.602
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kabupaten Nunukan	150 Dokumen	37.018.940	APBD II		150 Dokumen	37.018.940
					APBD II			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	4 Laporan	Rp 43.228.000			4 Laporan	Rp 43.228.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD**	**Kabupaten Nunukan**	**9 Dokumen**	**Rp 57.250.000**	APBD II	Pemenuhan fasilitas sarana perkantoran	**9 Dokumen**	**Rp 57.250.000**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	Rp 18.500.000	APBD II		2 Dokumen	Rp 18.500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	Rp 38.750.000	APBD II		7 Dokumen	Rp 38.750.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**	**Kabupaten Nunukan**	**1 Dokumen**	**246.151.912**	APBD II	***Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan***	**1 Dokumen**	**246.151.912**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	202.500.000	APBD II		1 Paket	202.500.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Nunukan	12 Dokumen	13.287.912	APBD II		12 Dokumen	13.287.912
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Nunukan	2 Orang	Rp 30.364.000	APBD II		2 Orang	Rp 30.364.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**		**4 Dokumen**	**244.635.477**	APBD II	Pemenuhan fasilitas sarana perkantoran	**4 Dokumen**	**244.635.477**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	6.290.680			1 Paket	6.290.680
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	35.285.670	APBD II		4 Paket	35.285.670
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	7 Paket	53.059.127			7 Paket	53.059.127
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	30 Laporan	150.000.000	APBD II		30 Laporan	150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Kabupaten Nunukan**	**2 Unit**	**Rp 99.900.000**			**2 Unit**	**Rp 99.900.000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	2 Unit	99.900.000	APBD II		2 Unit	99.900.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	0 Unit	-	APBD II		0 Unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	0 Unit	-	APBD II		0 Unit	-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Nunukan**	**2 Dokumen**	**3.684.522.448**			**2 Dokumen**	**3.684.522.448**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 104.900.000			12 Laporan	Rp 104.900.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 3.579.622.448	APBD II		12 Laporan	Rp 3.579.622.448
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**Kabupaten Nunukan**	**22 Unit**	**Rp 217.584.860**	APBD II		**22 Unit**	**Rp 217.584.860**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Nunukan	16 Unit	158.134.860	APBD II		16 Unit	158.134.860
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Nunukan	5 Unit	Rp 8.950.000	APBD II		5 Unit	Rp 8.950.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Nunukan	1 Unit	Rp 50.500.000	APBD II		1 Unit	Rp 50.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan** **2. Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan**	**Kabupaten Nunukan**	**100%** **100%**	**3.899.676.791,00**	APBD II	**Program Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pendukung Outcome LPPD**	**100%** **100%**	**3.899.676.791,00**
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani** **2. Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan**	**Kabupaten Nunukan**	**504 Kasus** **30 Orang**	**2.983.176.791**	APBD II	***Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan) dan pendukung LPPD***	**504 Kasus** **30 Orang**	**2.983.176.791**
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	375.316.257			2 Dokumen	375.316.257
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Nunukan	240 Dokumen	159.457.201	APBD II	Menindaklanjuti Instruksi Kemendagri No. 300.1.4/4980/BAK Terkait pengalokasian Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satgas	240 Dokumen	159.457.201

						linmas dan Anggota Satlinmas		
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kabupaten Nunukan	16 Dokumen	113.629.122	APBD II	Target capain naik, kerjasama antar lembaga lebih intens dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	16 Dokumen	113.629.122
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		7 Dokumen	3.920.000		*Pendukung SPM dan LPPD*	7 Dokumen	3.920.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Luar Daerah	5 Orang	100.000.000	APBD II	*Pegawai Satpol PP PNS diwajibkan melaksanakan Diklat Dasar Berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2020*	5 Orang	100.000.000

Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Luar Daerah	15 Orang	100.000.000		*Persyaratan untuk perpindahan jenjang*	15 Orang	100.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kabupaten Nunukan	60 Orang	185.254.613		*Sub Kegiatan Pendukung LPPD*	60 Orang	185.254.613
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	1.821.870.825		*Sub Kegiatan Pendukung LPPD*	12 Laporan	1.821.870.825
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Nunukan	4 Laporan	48.595.273		Indikasi terjadinya demonstrasi, Berdasarkan identifikasi pelaksanaan demonstrasi unjuk rasa sebanyak 4 kali	4 Laporan	48.595.273

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kabupaten Nunukan	4 Laproran	45.133.500		*Sub Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan penerima layanan)*	4 Laproran	45.133.500
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Kabupaten Nunukan	1 Dokumen	30.000.000		*Sub Kegiatan Pendukung LPPD*	1 Dokumen	30.000.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**Kabupaten Nunukan**	**23 Perda/Perkada**	**701.500.000**		***Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan) dan pendukung LPPD***	**23 Perda/Perkada**	**701.500.000**
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	150.000.000			12 Laporan	150.000.000
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2 Dokumen	1.500.000			2 Dokumen	1.500.000

				-		Sosialisasi Perda/perkada yang memuat sanksi secara langsung merupakan kewenangan OPD Teknis, namun kegiatan sosialisasi ini tetap dilaksanakan sekaligus dalam saat pembinaan dan penyuluhan		-
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	300.000.000		Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran perde/perkada yang berdampak terhadap peningkatan PAD (pembayaran pajak}	12 Laporan	300.000.000
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	250.000.000		Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran perde/perkada yang berdampak terhadap peningkatan PAD (pembayaran pajak}	12 Laporan	250.000.000

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	Kabupaten Bogor	**6 Orang**	**215.000.000**		***Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan) dan pendukung LPPD***	**6 Orang**	**215.000.000**
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Luar Daerah	1 Orang	40.000.000			1 Orang	40.000.000
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Kabupaten Bogor	4 Laporan	50.000.000			4 Laporan	50.000.000
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kabupaten Bogor	4 Laporan	125.000.000			4 Laporan	125.000.000

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagai suatu penjabaran dari RENSTRA Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan namun juga telah menyesuaikan dengan rancangan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi serta kewenangan Satpol PP Kabupaten Nunukan serta menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai dasar pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dalam penegakan Perda dan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Dengan adanya Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Nunukan dapat lebih terarah, terintegrasi dan terkoordinasi serta sinergitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Kontribusi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Nunukan, 31 Juli 2025
KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S. Sos., M. Si
NIP. 10700810 199803 1 008